BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan tergantung dari kesempurnaan aparatur negara. Faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan dalam suatu pemerintahan. Aparatur negara sebagai alat untuk melaksanakan pembangunan dalam hal ini diperlukan adanya aparatur yang benar-benar mampu, berdaya guna, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Hal tersebut sangatlah penting karena bagaimanapun juga keberhasilan suatu organisasi pemerintahan dalam mencapai suatu tujuan di tentukan oleh kualitas dan kemampuan aparatur yang berada di dalamnya.

Pemberdayaan dalam hal ini dimaksudkan sebagai proses transformasi dari berbagai aparatur yang mengarah pada saling menumbuhkembangkan dan saling memperkuat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Tujuan pemberdayaan itu sendiri adalah untuk meningkatkan mutu, keterampilan, serta memupuk kegairahan aparatur dalam bekerja sehingga dapat menjamin terwujudnya kesempatan berpartisipasi dan melaksanakan pembangunan secara menyeluruh. Pemberdayaan terhadap aparatur pemerintah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pemberdayaan terhadap aparatur daerah senantiasa mengacu pada perbaikan kualitas yang harus dinilai sejak rekruitmen dengan menggunakan suatu sistem yang benar-benar dapat menjamin diperolehnya sumber daya yang mempunyai kualitas dasar yang baik, dan berorientasi pada pemberdayaan aparatur, serta mengimplementasikan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah melalui pengembangan aparatur.

Aparatur merupakan suatu komunitas individu-individu yang memiliki tugas dan fungsi yang terlembagakan untuk melayani masyarakat diartikan secara singkat sebagai pemikir, perencana, pelaksana sekaligus pengawas jalannya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat atas nama kepala daerah. Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu unsur aparatur negara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan tujuan pembangunan nasional. Pelaksanaan tugas aparatur harus bertindak sebagai unsur dari sumber daya manusia yang mempunyai peranan dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan. Aparatur negara dengan kompentensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan loyalitas terhadap negara, bermoral dan bermental baik dan professional.

Sasaran dari pengembangan kualitas sumber daya aparatur adalah untuk meningkatkan kinerja operasional aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, kualitas sumberdaya aparatur yang tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas-tugas rutin sesuai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing secara lebih efisien, efektif, dan

produktif. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur menjadi sangat penting dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme.

Pengembangan aparatur juga dirancang untuk memperoleh aparatur-aparatur yang mampu berprestasi dan fleksibel untuk suatu instansi pemerintah dalam geraknya ke rnasa depan. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi bahwa "untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, keahlian, kemampuan dan keterampilan", oleh karena itu pengembangan aparatur sangat diperlukan dalam sebuah instansi pemerintahan, karena dengan adanya program tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur

Pendidikan dan pelatihan aparatur merupakan kegiatan pengembangan sumber daya aparatur untuk meningkatkan kemampuan diluar kemampuan dibidang pekerjaan atau jabatan yang dipegang, sebab pendidikan aparatur dirancang atau disesuaikan dengan posisi baru, dimana tugas-tugas yang akan dilakukan memerlukan kemampuan khusus yang lain dari yang mereka miliki sebelumnya. Pentingnya pendidikan dan pelatihan bukanlah semata-mata bagi aparatur yang bersangkutan, tetapi juga keuntungan organisasi. Karena dengan meningkatnya kemampuan atau keterampilan para aparatur, dapat meningkatkan produktivitas kerja para aparatur. Dengan demikian tujuan pendidikan dan pelatihan aparatur yakni untuk mempersiapkan aparatur dalam menempati posisi

atau jabatan baru, terutama dalam bidang pengelolaan kepegawaian yang profesional.

Berdasarkan hasil observasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa pengembangan sumber daya aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat belum mampu dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan kualitas dan kinerja aparatur yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya tugas dan tanggungjawab aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang belum terselesaikan tepat waktu, salah satunya adalah dalam pembuatan kartu pegawai, dan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) (*Sumber : Bidang Pengembangan Karir Tahun 2011 dan 2012*).

Kenyataaan lain yang terjadi bahwa kualitas aparatur di Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat belum maksimal, hal ini di tandai dengan aparatur yang latar belakang pendidikan dan kompetensi yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang di embannya, (*Sumber :Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 30-07-2012 diakses melalui (http://badiklatda.jabarprov.go.id*).

Permasalahan pengembangan aparatur lainnya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu masih sedikitnya aparatur yang mampu mengikuti diklat. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat selama dua tahun yaitu pada tahun 2011 dan 2012 yaitu hanya 9 (Sembilan) orang aparatur saja, Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.1
Jenis-Jenis Diklat Yang diikuti Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 dan 2012

NO	JENIS DIKLAT YANG PERNAH DIIKUTI	JUMLAH
1	Diklat Kepemimpinan TK IV, III,II	1
2	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	1
3	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	2
4	Diklat Pengelolaan Barang Daerah	1
5	Diklat Penata Usahaan Keuangan	2
6	Diklat Manajemen Kepegawaian	1
7	Diklat Analisis Kepegawaian	1
JUMLAH		9

Sumber : Bidang Pengembangan Karir Tahun 2011 dan 2012

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur yang mengikuti diklat pada tahun 2011 dan 2012 hanya 9 aparatur saja dari 147 jumlah aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan menurut ketentuan Badan Diklat Provinsi Jawa Barat seharusnya setiap jenis diklat di ikuti minimal 3 orang aparatur. Data dan fakta menunjukan masih sedikitnya aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mampu mengikuti diklat.

Selain permasalahan-permasalahan di atas, permasalahan pengembangan sumber daya aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat lainnya yaitu masih kurangnya promosi jabatan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Fakta yang ditemukan bahwa dalam 5 tahun terakhir promosi jabatan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat hanya 6 aparatur saja. (*Sumber : Bidang Pengembangan Karir Tahun 2012).* Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Jawa Barat belum maksimal, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural seharusnya promosi jabatan terutama jabatan struktural dalam 5 tahun harus ada pergantian mengingat jabatan Struktural yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat berjumlah 16 tetapi jabatan tersebut dalam 5 tahun terakhir baru 6 aparatur yang menggantikan jabatan struktural tersebut.

Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu masih jarang dilakukan mutasi aparatur. Data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2011 dan 2012 aparatur yang dimutasikan hanya berjumlah dua aparatur saja (*Sumber : Bidang Pengembangan Karir Tahun 2011 dan 2012*). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah belum dilaksanakan dengan optimal.

Berdasarkan fenomena di atas mengenai permasalahan sumber daya aparatur yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat selayaknya mampu memobilisasi atau mengembangkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki, terkait dengan diklat, promosi dan mutasi. Keadaan tersebut tidak terlepas dari program pengembangan aparatur dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang kurang

optimal maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui judul **"Pemberdayaan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat (Suatu Studi Pada Pengembangan Aparatur)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan proses pembahasan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pemberdayaan aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: Untuk memperoleh gambaran pemberdayaan aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari: pengembangan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan pengembangan aparatur melalui non diklat yang meliputi promosi, mutasi, insentif dan teguran dan hukuman.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam penelitian, serta untuk mengetahui tingkat

pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Pemerintahan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk masa yang akan datang bagi yang melaksanakan penelitian mengenai pemberdayaan aparatur.
3. Bagi Praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.